



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

TELAH DITELITI	
Pejabat	Tanggal
Sekretaris Daerah	
Asisten PKR	
Kepala Bappeda	
Kepala PD	
Kabag Hukum	
Sekretaris PD	
Kabid. Bappeda	

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 84



RENCANA KERJA (RENJA)

2022

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 84 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Bab I pasal 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi pada proses, sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksud maka proses pencapaian tujuan dari pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana

kerja perangkat daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2018-2023.

Adapun penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
2. Tahap Penyajian Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

1.1 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia;
- 12) Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- 13) KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Tenaga Kerja);
- 14) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) KEPMENDAGRI Nomor : 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Tingkat I dan Dinas Tenaga Kerja Tingkat II ;
 - 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
 - 19) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, dan Lembaga Teknis Daerah;
 - 22) Perda No 16 Tahun 2013 tentang RPJMD;
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Rencana Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2022.

1.2. Sistematika Penulisan :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab Ini Berisi Latar Belakang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja , Landasan Hukum Perlunya Penyusunan Rencana Kerja Serta Tujuan Rencana Kerja, Sistematika Penulisan Dan Maksud.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab Ini Menguraikan Tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu Dan Sejauh Mana Capaian Renstra SKPD, Selain Itu Juga Menganalisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Rencana Kerja SKPD Dan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Serta Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan hal-hal pokok tentang telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan serta program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan.

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB. V. PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang catatan penting yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, juga kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 menetapkan kaidah pelaksanaan sebagaimana berikut :

- a. Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan telah mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan masih belum sempurna terkait pemahaman tentang aturan dan atata cara penyusunan yang berbeda-beda.
- c. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, harus memperhatikan/mempedomani dokumen dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Pasuruan dan Renstra SKPD).

5.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatkan kapasitas SDM Aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

5.3 Hal-Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang penting di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dilingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan didanai oleh APBD Kabupaten dalam rangka mendukung Ketenagakerjaan dengan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja b) Pencari Kerja Yang Ditempatkan c) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun d) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan demikian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 ini dapat terwujud dan dilaksanakan untuk mencapai hasil akhir yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun Dengan harapan untuk Anggaran 2022 Dana yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan untuk mengakomodir hasil Musrenbang dari masyarakat dapat diwujudkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Bab I pasal 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi pada proses, sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksud maka proses pencapaian tujuan dari pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan,



responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2018-2023.

Adapun penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
2. Tahap Penyajian Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

1.1 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia;
- 12) Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- 13) KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Tenaga Kerja);
- 14) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 17) KEPMENDAGRI Nomor : 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Tingkat I dan Dinas Tenaga Kerja Tingkat II ;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
- 19) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, dan Lembaga Teknis Daerah;
- 22) Perda No 16 Tahun 2013 tentang RPJMD;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Rencana Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2022.



1.2. Sistematika Penulisan :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab Ini Berisi Latar Belakang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja , Landasan Hukum Perlunya Penyusunan Rencana Kerja Serta Tujuan Rencana Kerja, Sistematika Penulisan Dan Maksud.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab Ini Menguraikan Tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu Dan Sejauh Mana Capaian Renstra SKPD, Selain Itu Juga Menganalisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Rencana Kerja SKPD Dan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Serta Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan hal-hal pokok tentang telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan serta program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan.

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB. V. PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang catatan penting yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, juga kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tahun lalu (2020) dan capaian tahun berjalan (2021). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tahun-tahun sebelumnya. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020 dan target tahun 2021.

❖ Urusan Ketenagakerjaan

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, peningkatan kesejahteraan para pekerja, ketenangan dan kenyamanan berusaha. Pembangunan bidang ketenagakerjaan selama ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain semakin tingginya jumlah pencari kerja dan angkatan kerja, sementara tingkat penyerapan tenaga kerja tidak bisa mengimbangi kenaikan tersebut, sehingga tingkat pengangguran terbuka ikut naik, terbatasnya penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dan masih rendahnya tingkat produktivitas para pekerja/buruh. Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan dalam kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja



siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan kerja yang didukung dengan sistem Informasi Pasar Kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh pada semua lini yang terkait ketenagakerjaan.

Realisasi belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp. 5.836.687.909,- atau 79,53 % dari anggaran yang tersedia Rp. 7.338.291.500,- secara rinci tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.1



Tabel 2.1

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan

PD: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

No.	Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	100%	100	2.373.355.000	1.739.192.949	73,28
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 Surat	1.000 Surat	100	45.000.000	27.443.902	60,99
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	570.000.000	288.794.247	50,67
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	160.100.000	93.067.500	58,13
4.	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Kendaraan	20 Kendaraan	100	40.000.000	11.543.300	28,86
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100	152.240.000	103.895.000	68,24
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	100	80.454.000	80.454.000	100,00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	60.500.000	60.500.000	100,00
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	300 Kotak	300 Kotak	100	38.000.000	26.555.000	69,88
9.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50 Kali	50 Kali	100	124.061.000	105.090.000	84,71
10.	Penyediaan Jasa Perkantoran	12 Bulan	1 Bulan	8,33	1.001.500.000	845.280.000	84,40
11.	Bimbingan Teknis Aparatur	3 Orang	3 Orang	100	20.000.000	16.570.000	82,85
12.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	81.500.000	80.000.000	98,16
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	100%	100	477.460.000	365.465.009	76,54
1.	Pengadaan Mebelair	1 Paket	0 Paket	0	20.000.000	0	0
2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	100	87.000.000	86.450.000	99,37
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 Kendaraan	20 Kendaraan	100	285.000.000	195.480.009	68,59
5.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	85.460.000	83.535.000	97,75
6.	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor	1 Gedung	0 Gedung	0	0	0	0
3	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL				1.600.000.000	1.360.266.951	85,02
1.	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	1 Paket	1 Paket	100	1.239.950.000	1.002.266.951	80,83

**RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2022**

	2.	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	80 Orang	80 Orang	100	360.050.000	358.000.000	99,43
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS					824.872.000	661.275.000	80,17
	1.	Peningkatan Pelatihan Kerja	48 Orang	48 Orang	100	282.988.000	230.275.000	81,37
	2.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	90 Perusahaan	80 Perusahaan	88,89	361.634.000	268.275.000	74,18
	3.	Pelayanan Sertifikasi Tenaga Kerja dan Akreditasi LPK	16 Orang	16 Orang	100	110.000.000	95.050.000	86,41
	4.	Forum CSR	50 Perusahaan	23 Perusahaan	46	70.250.000	67.675.000	96,33
5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA					1.072.032.000	1.016.693.000	94,84
	1.	Pencmpatan dan Bursa Kerja	1.842 Orang	1.839 Orang	99,84	481.235.000	469.299.000	97,52
	2.	Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100 Orang	100	431.604.000	429.294.000	99,46
	3.	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Orang	12 Orang	12	159.193.000	118.100.000	74,19
6	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA					991.572.500	693.795.000	69,97
	1.	Koordinasi dan Upaya Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	56 Kasus	60 Kasus	107,14	466.430.000	376.710.000	80,76
	2.	Pelayanan dan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kelembagaan	60 Perusahaan	60 Perusahaan	100	349.357.500	185.455.000	53,08
		Koordinasi dan Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100 Peserta	100 Peserta	100	175.785.000	131.630.000	74,88

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

❖ **Urusan Transmigrasi**

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan masih tinggi, maka perlu dilakukan upaya persebarannya dengan melakukan transmigrasi. Urusan ketransmigrasian dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang akan bertransmigrasi. Program transmigrasi secara regulasi masih bergantung pada Pemerintah Pusat/Provinsi, baik untuk sarana dan prasarana maupun lokal transmigrasi(daerah tujuan), untuk Tahun 2020 tidak memberangkatkan calon transmigran di karenakan adanya pandemik Covid -19.



Tabel 2.4

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Ketransmigrasian**

PD: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

No	Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas						
	Kegiatan : Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
	1. Kunjungan dan Evaluasi	1	1	100	Rp.	Rp.	
	2. Penyuluhan Transmigrasi	255	255	100	159.193.000,-	118.100.000,-	74,19

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran yang akan dicapai pada urusan ketenagakerjaan sebagaimana salah satu sasaran pembangunan jangka menengah 2013-2018 yaitu terciptanya peningkatan kualitas tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran di atas dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut:

❖ **Capaian indikator kinerja pembangunan daerah**

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan mendukung pembangunan pada aspek kesejahteraan (fokus kesejahteraan masyarakat), aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib) dan aspek daya saing daerah (fokus sumber daya manusia). Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana Tabel 2.2

Tabel : Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Tujuan : Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,42	6,24
2	Sasaran : Meningkatnya ketrampilan pencari kerja, penempatan dan perluasan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	70,05	43,4
		Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	%	68,75	75

➤ **Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja :**

❖ **Tingkat pengangguran terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,24% naik sebesar 0.82 % dari tahun 2019 (5,42%). Kenaikan ini merupakan dampak pandemi covid 19 mulai dari kebijakan perusahaan merumahkan karyawannya atau memberlakukan sistem WFH yang berimbas pada penurunan produksi, Perusahaan belum siap melakukan rekrutment tenaga kerja,



penurunan penyerapan tenaga kerja baik sektor formal atau sektor informal dikarenakan tidak terlaksananya semua program pemerintah yang berbasis masyarakat seperti Program Peningkatan Kerja (peyebarluasan informasi pasar kerja) kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan kegiatan Pelatihan dan Produktivitas yang bertujuan untuk peningkatan skill, kompetensi dan sertifikasi pencari kerja, ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi link and match) serta Peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri yang menyebabkan meningkatnya TPT.

❖ **Persentase pencari kerja yang ditempatkan**

- ❖ Indikator ini mempunyai pengertian pencari kerja yang terdaftar dan tercatat yang diterima bekerja oleh pemberi kerja. Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah para calon tenaga kerja yang bekerja dalam institusi pemerintah maupun perusahaan, bekerja di luar negeri sebagai TKI/PMI maupun melakukan wirausaha mandiri. Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan wujud keberhasilan suatu daerah dalam menanggulangi pengangguran. Tahun 2020 persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 43,4% (sesuai dengan Permenakertrans No 2 Tahun 2014 tentang standard pelayanan minimal ketenagakerjaan) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 (70,05 %) sebesar 26,65 %. Penurunan pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan pandemi covid 19 yang berdampak pada semua sektor termasuk sektor Ketenagakerjaan yang mengakibatkan permintaan pasar menurun sehingga perusahaan belum merekrut karyawan secara masive dan dipengaruhi juga oleh kebijakan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

❖ **Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi**

Secara berkala pemerintah daerah mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi bagi peserta. Tahun 2020 tercatat sebanyak 16 orang



peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi sebanyak 12 orang (75%) pada Pelatihan Teknik Otomotif Roda Dua/R2. Sedangkan tahun 2019 tercatat 68,75 yang lulus uji kompetensi untuk Pelatihan Kejuruan Las, Otomotif Roda Dua/R2, Teknologi Mekanik. Belum Maksimalnya jumlah peserta lulus uji kompetensi disebabkan karena latar belakang pendidikan peserta adalah SMU bukan SMK. Rincian jumlah peserta pelatihan sebagai berikut.

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Sengketa pengusaha dengan pekerja bisa diakibatkan karena adanya perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan hak terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak dalam hubungan pengusaha dengan pekerja, masing-masing memiliki beda pelaksanaan dan penafsiran mengenai haknya baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan muncul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja. Perselisihan PHK muncul karena tidak ditemuinya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja diperoleh dari jumlah sengketa/perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan baik berupa anjuran mediator maupun perjanjian bersama, pada tahun 2020 ini terdapat 51 kasus yang dapat diselesaikan dari target 48 kasus yang didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan (tercapai 100 %)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2020 beserta upaya penyelesaiannya sebagaimana tabel berikut :

No	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
1	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan karena Pandemi Covid-19 Job Fair tidak Terlaksana	1. Pengaturan Scedule di Triwulan I dan II Melaksanakan Job Fair Online
2	Dampak Pandemi Covid-19	2. Memyesuaikan surat dari Kementrian Ketenagakerjaan dan BP2MI tentang Proses Pemberangkatan ke Luar Negri
3	Karena ada UU 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaanya belum ada	3. Menunggu Hasil PP dan UU 11 Tahun 2020
4	Awal Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan May Day 2020 tidak dillaksanakan	4. Melihat Perkembangan Situasi Covid-19
5	Refocusing Anggaran karena Covid-19 sehingga Komponen Pendukung tidak lengkap	5. Mengatasi Permasalahan dan Memperbaiki Pendukung

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 50 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk Permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain:



- ❑ Permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, yaitu :
 - ❑ Masalah Tenaga Kerja :
 - 1) Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
 - 2) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
 - 3) Rendahnya tingkat pendidikan;
 - 4) Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan;
 - 5) Tidak seimbangnya penerimaan tenaga kerja;
 - 6) Rendahnya kompetensi pencari kerja;
 - 7) Kurangnya pegawai teknis (Instruktur, Mediator, Pengantar Kerja).
 - ❑ Masalah Transmigrasi :
 - 1) Tidak seimbangnya animo masyarakat bertransmigrasi dengan kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar Jawa yang diberikan pemerintah pusat;



Penentuan isu-isu strategis

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	1 Meningkatnya Ketrampilan Pencaker, Penempatan dan Perluasan Kerja dengan indikator sasara sebagai berikut :	1 Lapangan pekerjaan semakin terbatas	1 Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi, sebagai keterbatasan lowongan pekerjaan/kesempatan kerja;
2	- Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2 Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka	2 Kualitas kompetensi angkatan kerja/pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha;
	- Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	3 Rendahnya tingkat pendidikan	3 Optimalisasi operasional di UPT LKD belum optimal karena terkendala SDM Instruktur.
	- Persentase Rasio Penduduk yang Bekerja	4 Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan	
		5 Tidak seimbang penerimaan tenaga kerja;	
		6 Rendahnya kompetensi pencari kerja;	

**RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2022**

2	Menurunnya Tingkat Perselisihan Pekerja dan Pengusaha sesuai UU Ketenagakerjaan dengan indikator sasaran sebagai berikut		4	Sinergi antar pelaku usaha dengan unsur serikat masih belum optimal;
-	Persentase Perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kurangnya pegawai teknis (Instruktur, Mediator, Pengantar Kerja)	5	Kestabilan konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3	Tersedianya calon – calon transmigrasi yang siap diberangkatkan ketempat tujuan dengan indikator sasaran sebagai berikut	Tidak seimbangnya animo masyarakat bertransmigrasi dengan kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar jawa yang diberikan pemerintah pusat	6	Pemberangkatan calon transmigran tidak Optimal/sering tertunda keberangkatannya (kuota calon ditentukan oleh pemerintah pusat);
-	Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi			
-	Calon transmigrasi yang diberangkatkan			



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah :
 - ✓ Masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja;
 - ✓ Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat;
 - ✓ Kurangnya tenaga fungsional instruktur, pengantar kerja dan mediator.
 - ✓ Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;
 - ✓ Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh;
 - ✓ Banyaknya kesempatan bekerja ke luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidak sesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kesempatan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
 - ✓ Kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar pulau jawa yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat;
 - ✓ Masih banyaknya transmigran yang pulang pergi.
2. Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan adalah :
 - Kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya;
 - Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global;
 - Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja;
 - Tekanan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil (UMK yang tinggi);



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 menetapkan indikator capaian kinerja, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, kondisi eksisting tahun 2018 sebesar 6,11 %, tahun 2019 diperkirakan menjadi 6,02 % dan pada tahun 2020 sebesar 5,08 %. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka di peroleh dengan penghitungan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di kali 100.

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat ditingkatkan dengan meningkatnya penempatan tenaga kerja, meningkatnya jumlah pencari kerja yang bersertifikasi sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja, menurunnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang bermasalah, menurunnya angka perselisihan hubungan industrial di perusahaan – perusahaan sehingga bisa mengurangi angka pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan kondisi yang kondusif dalam hubungan industrial. Pengiriman peserta transmigrasi yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai kebutuhan daerah tujuan juga bisa mendukung dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

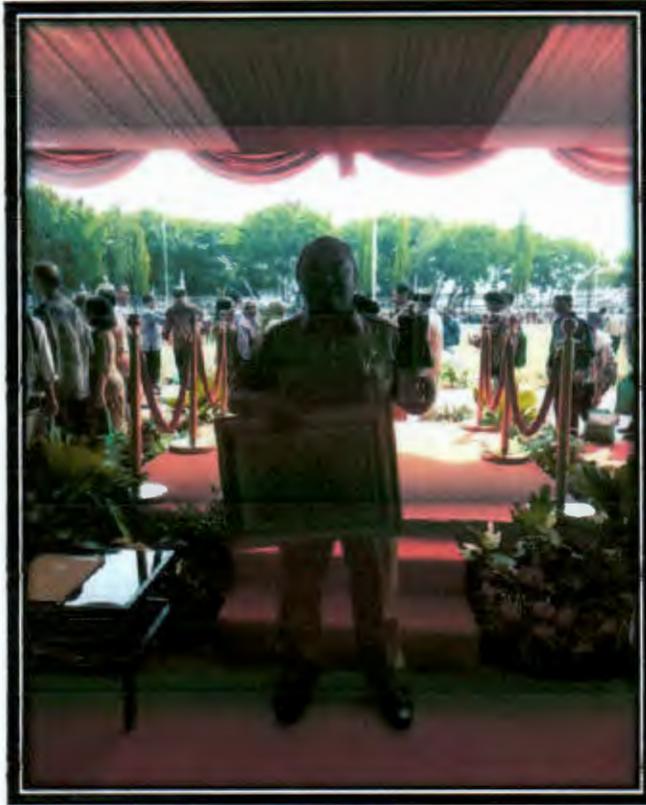
Upah minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2018 mencapai Rp. 3.574.486,72 sehingga kebutuhan minimum para pekerja di Kabupaten Pasuruan dapat terpenuhi. UMK tinggi, pekerja sejahtera, daya beli masyarakat meningkat.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, di Kabupaten Pasuruan yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Peningkatan Kesempatan Kerja;
- c. Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerjadan Perlindungan Tenaga Kerja;
- d. Penempatan Transmigrasi

c. Prestasi

1. Peringkat IV Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 kepada Bupati Pasuruan dari Gubernur Jawa Timur;

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.



2.4 Tabel

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pencari kerja yang ditempatkan	Besaran pencari kerja yang ditempatkan (sesuai Permenakertrans No 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan)	%	43,50	43,70	43,90	43,11	43,4	-	43,90	43,11	
2	Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	Terdiptanya Wirausaha Baru (WUB)	orang	100	120	100	100	100	-	100	100	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	100%	7.595.661.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	100%	7.595.661.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Operasional Kantor	12 Bulan	6.309.061.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Operasional Kantor	12 Bulan	6.309.061.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai yang terbayarkan	12 Bulan	5.216.661.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai yang terbayarkan	12 Bulan	5.216.661.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai Honoror dan THL yang terbayarkan	12 Bulan	992.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai Honoror dan THL yang terbayarkan	12 Bulan	992.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Adminitrasi Keuangan yang dibayar	12 Bulan	100.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Adminitrasi Keuangan yang dibayar	12 Bulan	100.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah pembayaran operasional kantor	12 Bulan	140.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah pembayaran operasional kantor	12 Bulan	140.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	-	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3Kali	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3Kali	50.000.000	
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Tamu dan Peseta Rapat	100 Orang	50.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Tamu dan Peseta Rapat	100 Orang	50.000.000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	50 Kali	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	50 Kali	40.000.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mebelair	1 Paket	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mebelair	1 Paket	-	
1	Pengadaan Mebel	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mebelair	1 Paket	-	Pengadaan Mebel	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mebelair	1 Paket	-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Operasional	12 Bulan	750.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Operasional	12 Bulan	750.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Surat yang di kirim	900 Surat	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Surat yang di kirim	900 Surat	30.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Bulan untuk Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telpon	12 Bulan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Bulan untuk Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telpon	12 Bulan	600.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan Kantor	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan Kantor	1 Paket	45.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	75.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	14 Kendaraan	355.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	14 Kendaraan	355.600.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	14 Kendaraan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	14 Kendaraan	300.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	14 Kendaraan	26.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	14 Kendaraan	26.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Gedung yang di perbaiki	2 Gedung	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Gedung yang di perbaiki	2 Gedung	30.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana Prasaran Gedung Kantor	3 Paket		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana Prasaran Gedung Kantor	3 Paket		
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Pasuruan	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60%	1.700.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Pasuruan	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60%	1.700.000.000	
7	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	160 Peserta	1.600.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	160 Peserta	1.600.000.000	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	160 Peserta	1.600.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	160 Peserta	1.600.000.000	
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Koordinasi	12 Kali		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Koordinasi	12 Kali		
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan	1 Paket		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan	1 Paket		
8	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Lembaga LPK	16 LPK	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Lembaga LPK	16 LPK	25.000.000	

No	Rancangan Awal RRPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Lembaga LPK	16 LPK	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Lembaga LPK	16 LPK	25.000.000	
9	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM	2 Orang	25.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM	2 Orang	25.000.000	
1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM	2 Orang	25.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM	2 Orang	25.000.000	
10	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Konsultasi	10 Perusahaan	25.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Konsultasi	10 Perusahaan	25.000.000	
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Konsultasi	10 Perusahaan	25.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Konsultasi	10 Perusahaan	25.000.000	
11	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	25.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	25.000.000	
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	25.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	25.000.000	
DI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	40%	200.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	0,4	200.000.000	
12	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBBK, Peserta Pelatihan	60 BKK, 160 Peserta	100.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBBK, Peserta Pelatihan	60 BKK, 160 Peserta	100.000.000	
1	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBBK, Peserta Pelatihan	60 BKK, 160 Peserta	25.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBBK, Peserta Pelatihan	60 BKK, 160 Peserta	25.000.000	

No	Rancangan Awal RRPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SMA/SMK dan PT	40		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SMA/SMK dan PT	40	-	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SMA/SMK dan PT	40		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SMA/SMK dan PT	40	-	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Disabilitas yang dilayani	40	75.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Disabilitas yang dilayani	40	75.000.000	
	Perluasan Kesempata Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SMA/SMK dan PT	40		Perluasan Kesempata Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SMA/SMK dan PT	40	-	
13	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Aplikasi	1	60.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Aplikasi	1	60.000.000	
1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Aplikasi	1	10.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Aplikasi	1	10.000.000	
2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	25.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	25.000.000	
3	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	250 Orang	25.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	250 Orang	25.000.000	
14	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah PMI yang di layani	100 Orang	25.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah PMI yang di layani	100 Orang	25.000.000	
1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah PMI yang di layani	100 Orang	25.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah PMI yang di layani	100 Orang	25.000.000	

No	Rancangan Awal RRPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi	100 perusahaan	15.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi	100 perusahaan	15.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang di monitor	100 perusahaan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang di monitor	100 perusahaan	15.000.000	

No	Rancangan Awal REPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	80%	471.264.500	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	0,5	471.264.500	
16	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peraturan perusahaan yang disahkan	50	105.770.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peraturan perusahaan yang disahkan	50	105.770.000	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peraturan perusahaan yang disahkan	50	12.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peraturan perusahaan yang disahkan	50	12.000.000	
2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	25		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	25		
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dan Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten	1200 Perusahaan dan 6 Kali	93.770.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dan Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten	1200 Perusahaan dan 6 Kali	93.770.000	
17	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan	60 Kasus	365.494.500	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan	60 Kasus	365.494.500	

No	Rancangan Awal RRPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mogok Kerja yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Fasilitasi	10 Kasus	26.954.500	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mogok Kerja yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Fasilitasi	10 Kasus	26.954.500	
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Kasus	-	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Kasus	-	
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah LKS Bipartit dan PUK SP/SB yang terbentuk	10 LKS dan 12 PUK	-	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah LKS Bipartit dan PUK SP/SB yang terbentuk	10 LKS dan 12 PUK	-	
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Revisi Perda, Rekomendasi LKS Tripartit dan Jumlah Peserta MAYDAY	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	338.540.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Revisi Perda, Rekomendasi LKS Tripartit dan Jumlah Peserta MAYDAY	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	338.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi	50%	15.129.021	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi	0,5	15.129.021	
18	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Calon Transmigrasi	5 KK	15.129.021	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Calon Transmigrasi	5 KK	15.129.021	
1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Calon Transmigrasi	5 KK	15.129.021	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Calon Transmigrasi	5 KK	15.129.021	
2	Penyuluhan Transmigrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Penyuluhan	100 Orang	-	Penyuluhan Transmigrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Penyuluhan	100 Orang	-	
				Jumlah	9.982.054.521					9.982.054.521	





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).



Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN PASURUAN

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mengembangkan SPM dan Sumber Daya Alam Dengan Mengadakan Pelatihan Keterampilan Wira Usaha.	Masing-Masing DCP SP/SB	Korban Phk		
2	Sosialisasi UUNo.11 Thn 2020 Cipta Kerja Dan PP.	Masing-Masing DCP SP/SB	Perwakilan Pengurus unit tenaga Kerja dan Perwakilan Pengusaha		SP/SB
3	Pembinaan Ke Perusahaan-perusahaan Dengan Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi yang ada.	Perusahaan	Pengusaha		
4	FRIP Kabupaten Pasuruan (Forum komunikasi kinerja perdagangan	Kabupaten pasuruan/ Perusahaan –perusahaan industri di kabupaten pasuruan	Mengurangi Penganguran Melalui Program Perdagangan		FRIP
5	Sosialisa PP UU II th 2020	Pasuruan	Pimpinan Perusahaan/HRD		SP/SB

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pelatihan Persiapan Pensiun	BLK	Para kariawan yang akan pensiun		SP/SB
7	Sosialisasi terkait TKA (TENAGA KERJA ASING)	Pasuruan	Perusahaan Pengguna Tenaga kerja Asing		PJTKI
8	Sosialisasi omnibuslaw (Ciptaker)	Pasuruan	Perusahaan dan serikat pekerja		
9	Vy Semua Perogram Dinasker Sebaiknya jangan di sosialisasikan ke kecamatan di kabupaten pasuruan	Pasuruan	Lulusan sma ,smk ,D3-S1		
10	Pelatihan Kerja	Di adakan di Prusahaan-Perusahaan	Tenaga Kerja yang Ter PHK/Mendekati usia penuaan		SP/SB
11	Pendampingan Kewira usahaan Bimtek		Tenaga kerja		
12	Perlatihan Tenaga kerjabaru dari kantor PHK		Format & Non format		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Serikat tenaga kerja Lebih Di perhatikan dengan dana hibah		SP/SB Yang Valid		
14	Bantuan Pemerintah terkait dana Pelatihan sosialisasi hubungan industri		Memberikan pengetahuan dan pemahaman Sosialisasi perturan ke tenagakerjaan		
15	Pendampingan Pelatihan pesertanya agar dapat bisa aplikasi dari kehidupanya				SP/SB
16	Lomba memaksimalkan cabang di dinasker dalam hubungan industri		Mengurangi masalah hubungan industrional pasuruan		
17	Kegiatan pelatian/anggota SP/SB (Dana hibah)	SP/SB yang memerlukan	Meningkatkan SDNA anggota / Supaya fokus yang masih di undang penyampaian		SP/SB
18	Sepakat dengan verifikasi data anggota SP/SB				
19	Peningkatan pelatihan bagi pengelola BKK.SMK	SMK N/S Kab. pasuruan	Gun/ Koordinator		
20	Peningkatan Info Lowongan Kerja Industri Bagi siswa / alumni siswa smk		BKK.SMK		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Memberikan Sosialisasi smk kab. Yang belum mendapat tanda BKK dinasker	SMK N/S Kab. pasuruan	SMK N/S Kab.		FK BKK
22	Bintek pengelola BKK	Kab. pasuruan	Koordinnator bkk smk kab. Pasuruan (73) SMK		
23	Insentik bagi pengelola BKK		Koordinator BKK (73 SMK		
24	Koordinasi dengan forum pemagangan		Forum pemagangan dan FKBKK		



2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang dipengaruhi oleh factor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal :

SDM

Pegawai Negeri Sipil saat ini dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan berjumlah 41 (empat puluh satu) pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan ruang, sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosen
1	Pasca Sarjana	6	30
2	Sarjana	22	47
3	Diploma 3	-	-
4	Diploma 2	-	-
5	Sarjana Muda	-	-
6	SLTA	13	23
	JUMLAH	41	100

No.	Golongan	Jumlah	Prosen
1	Golongan IV	7	31,34
2	Golongan III	22	44,61
3	Golongan II	8	15,05
4	Fungsional	4	10
	JUMLAH	41	100



- a. **BIDANG KETENAGAKERJAAN :**
- Masih banyaknya jumlah pengangguran terbuka
 - Lapangan pekerjaan tersedia kurang produktif
 - Rendahnya kualitas dan keberdayaan masyarakat pencari kerja dalam penciptaan dan perolehan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha
 - Belum optimalnya pengembangan hubungan industrial dan perluasan lapangan kerja
 - Lemahnya penjaminan perlindungan keselamatan dan kesempatan kerja
- b. **BIDANG TRANSMIGRASI :**
- Banyaknya animo pendaftar calon transmigrasi yang belum bisa berangkat Mekanisme transmigrasi pola baru melalui mekanisme Kerjasama Antar Daerah (KSAD)

2.2 KONDISI YANG DI INGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

- a. **BIDANG KETENAGAKERJAAN**
- Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka
 - Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan/perolehan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
 - Meningkatnya hubungan industrial dan perluasan lapangan kerja
- b. **BIDANG TRANSMIGRASI**
- Semakin banyak transmigrasi yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi
 - Terlaksananya kerjasama antar daerah dapat berjalan dengan baik
 - Meningkatnya kualitas dan produktifitas calon transmigrasi

2.3 Penelaahan Usulan Program

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dnas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dnas Tenaga Kerja



Kabupaten Pasuruan mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang diusulkan sejalan mendukung daripada RPJMD Kabupaten Pasuruan disamping perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan peraturan yang mengharuskan untuk mengakomodir. Kegiatan menunjang dalam bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian secara utuh.

Kemudian dalam rangka perlindungan TKI perlu adanya payung hukum yang mengatur tentang tatacara perekrutan, perlindungan saat bekerja dan paska TKI purna. Mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, tatacara perekrutan dan penempatan sehingga tidak terjadi monopoli tenaga kerja asing disegala sektor.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempermudah mengakses lowongan pekerjaan bagi pencari kerja dan penyedia lowongan pekerjaan perlu adanya pembuatan software on line ketenagakerjaan, disamping itu juga penyebaran informasi bursa kerja baik melalui media massa ataupun elektronik serta pameran bursa kerja (job market fair) sangatlah dinantikan oleh para pencari kerja (job seekers).

Pembentukan lembaga kerjasama Bipartit, PP, PKB dalam perusahaan perlu didorong agar tercipta ketenangan dalam bekerja dan hak-hak pengusaha terlindungi. Hubungan yang harmonis, adil dan bermartabat antara pekerja dan pengusaha perlu ditingkatkan. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi harapan para pekerja agar mereka terlindungi baik dari segi kesehatan dan masa depan mereka. Selain itu perlu juga adanya peringatan hari Buruh Internasional (Mayday) dalam rangka menjaga dan menjalin hubungan yang harmonis dalam hubungan industrial.

Menindaklanjuti penetapan dan penerapan usulan UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten sebagai unsur pemerintah perlu untuk melaksanakan monitoring, evaluasi tentang pelaksanaan UMK, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui seberapa banyak perusahaan yang mampu untuk menerapkan UMK. Dan bagi perusahaan yang belum menerapkan agar diwajibkan menerapkan UMK pada perusahaan masing-masing.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional :

Rumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja diarahkan pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dalam empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk



berpartisipasi sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Ketenagakerjaan serta tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan;
- d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Stuktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 16 tahun 2016. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang, yaitu : Kabid. PelatihanKerja dan Produktivitas, Kabid. Hubungan Industrial dan Jamsostek dan Kabid. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.



Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

Visi Pemerintah Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pemerintah daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi pemerintah daerah menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik pemerintah daerah baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018 – 2023, dicanangkan tujuan pembangunan perikanan Kabupaten Pasuruan yang mengacu kepada Visi Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023 sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan target serta pencapaian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”

Selanjutnya, Misi pemerintah daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pemerintah daerah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi pemerintah daerah yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi PD

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pasuruan 2018–2023 tersebut maka ditetapkan 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten



- Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
 4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
 5. Meningkatkan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan

Pembangunan bidang perikanan merupakan bagian dari **misi ke-1 (satu)** dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi, sasaran meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif dengan indikator PDRB sektor pertanian, serta **misi ke-4 (empat)** dengan tujuan mewujudkan kinerja pemerintah daerah, yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif dengan indikator indeks reformasi birokrasi, dan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator nilai SAKIP, opini BPK, IKM dan Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mencanangkan program strategis yang menjadi program unggulan pembangunan daerah Tahun 2018–2023. Dan selanjutnya pembangunan sektor perikanan



dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan, prioritas daerah serta program-program unggulan yang menjadi *jargon* pemerintah Kabupaten Pasuruan, yaitu antara lain :

- ❖ *Satrya Emas* (Pusat Strategi Dan Layanan Ekonomi Maslahat).
- ❖ *Pelasan* (Pelatihan Santri), *Perwira Keluarga* (Perempuan Wirausah
- ❖ Berbasis Keluarga) *Pasuruan Podo Roso* (Pemerataan Ekonomi Dan Pelayanan Publik).
- ❖ *Kenduren Mas* (Kendaraan Urun Rembug Masyarakat)

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian perangkat daerah. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, yang tertuang dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, antara lain :

1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis, berkeadilan dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kompetensi, iman dan taqwa.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih maju, mandiri dan dinamis dengan mengoptimalkan potensi daerah, pembangunan wilayah dan kemitraan serta pemeliharaan stabilitas pengembangan dunia usaha.

Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, ditetapkan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

" Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka "

dengan Indikator Tujuannya adalah :

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses



perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas serta pernyataan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan ditetapkanlah sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

Sasaran :

" Meningkatkan Ketrampilan Pencaker, Penempatan dan Perluasan Kerja ".

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah :

1. Persentase Pencari Kerja yang diTempatkan

Yang diukur melalui Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar.

Formula Perhitungan adalah sebagai berikut ;

=

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$$

2. Persentase Peserta Pencari kerja yang lulus kompetensi

Yang diukur melalui Jumlah Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi dan Jumlah Peserta Pelatihan yang sudah di latih.

=

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah pencari kerja yang sudah dilatih}} \times 100 \%$$

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Bukan Indikator Kinerja Utama/Non-IKU) yang diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

- ❖ Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kinerja yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan



RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2022

- ❖ Nilai IKM berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan



Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Persentase Pelayanan Adminitrasi Kantor	1	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Operasional Kantor	12 Bulan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai yang terbayarkan	12 Bulan	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai Honorer dan THL yang terbayarkan	12 Bulan	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Adminitrasi Keuangan yang dibayar	12 Bulan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah pembayaran operasional kantor	12 Bulan	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Komponen Isnatalasi Listrik	12 Bulan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3Kali	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Tamu dan Peserta Rapat	100 Orang	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	50 Kali	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mebelair	1 Paket	
1	Pengadaan Mebel	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mebelair	1 Paket	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Operasional	12 Bulan	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Surat yang di kirim	900 Surat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Bulan untuk Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telpon	12 Bulan	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan Kantor	1 Paket	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	14 Kendaraan	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	14 Kendaraan	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	14 Kendaraan	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Gedung yang di perbaiki	2 Gedung	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor	3 Paket	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Pasuruan	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60%	
7	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	160 Peserta	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	160 Peserta	Ada Dana DBHCHT
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Koordiinasi	12 Kali	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan	1 Paket	
8	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Lembaga LPK	16 LPK	
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Lembaga LPK	16 LPK	
9	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM	2 Orang	
1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM	2 Orang	
10	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Konsultasi	10 Perusahaan	
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Konsultasi	10 Perusahaan	
11	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Pasuruan	Pesentase Pencari Kerja yang di tempatkan	40%	
12	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBKK, Peserta Pelatihan	60 BKK, 160 Peserta	
1	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBKK, Peserta Pelatihan	60 BKK, 160 Peserta	
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SMA/SMK dan PT	40	
13	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Aplikasi	1	
1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Aplikasi	1	
2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	
3	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	250 Orang	
14	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah PMI yang di layani	100 Orang	
1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah PMI yang di layani	100 Orang	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi	100 perusahaan	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang di monitor	100 perusahaan	
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	50%	
16	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peraturan perusahaan yang disyahkan	50	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peraturan perusahaan yang disyahkan	50	
2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disyahkan	25	
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dan Juma Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten	1200 Perusahaan dan 6 Kali	
17	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan	60 Kasus	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Mogok Kerja yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Fasilitasi	10 Kasus	
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Kasus	
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah LKS Bipartit dan PUK SP/SB yang terbentuk	10 LKS dan 12 PUK	
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Revisi Perda, Rekomendasi LKS Tripartit dan Jumlah Peserta MAYDAY	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi	50%	
18	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Calon Transmigrasi	5 KK	
1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Calon Transmigrasi	5 KK	
2	Penyuluhan Transmigrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peserta Penyuluhan	100 Orang	

Pasuruan, 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN

ttd.

Drs. TRI AGUS BUDIHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198602 1 002



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Adminitrasi Kantor		100%	7.595.661.000			100%	7.595.661.000
2.07.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	3 Dokumen	40.000.000				Rp 40.000.000
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	3 Dokumen	Rp 40.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp 40.000.000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 40.000.000			<i>Belanja operasi</i>	Rp 40.000.000
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -			<i>Belanja pegawai</i>	
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 40.000.000			<i>Belanja barang dan jasa</i>	Rp 40.000.000
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -			<i>Belanja bunga</i>	
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -			<i>Belanja subsidi</i>	
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -			<i>Belanja hibah</i>	
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -			<i>Belanja bantuan sosial</i>	
					<i>Belanja modal</i> : Rp -			<i>Belanja modal</i>	
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			<i>Belanja tidak terduga</i>	
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -			<i>Belanja transfer</i>	

2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Operasional Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp 6.309.061.000	DAU	12 Bulan	Rp 6.309.061.000
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp 5.216.661.000	DAU	12 Bulan	Rp 5.216.661.000
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Honoror dan THL yang terbayarkan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp 992.400.000	DAU	12 Bulan	Rp 992.400.000
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Adminitrasi Keuangan yang dibayar	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp 100.000.000	DAU	12 Bulan	Rp 100.000.000
					Belanja operasi : Rp 6.309.061.000		Belanja operasi	Rp 6.309.061.000
					Belanja pegawai : Rp -		Belanja pegawai	
					Belanja barang dan jasa : Rp 6.309.061.000		Belanja barang dan jasa	Rp 6.309.061.000
					Belanja bunga : Rp -		Belanja bunga	
					Belanja subsidi : Rp -		Belanja subsidi	
					Belanja hibah : Rp -		Belanja hibah	
					Belanja bantuan sosial : Rp -		Belanja bantuan sosial	
					Belanja modal : Rp -		Belanja modal	
					Belanja tidak terduga : Rp -		Belanja tidak terduga	
					Belanja transfer : Rp -		Belanja transfer	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran operasional kantor	Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp 140.000.000	DAU	12 Bulan	Rp 140.000.000
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp -	DAU	12 Bulan	Rp -
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	3Kali	Rp 50.000.000	DAU	3Kali	Rp 50.000.000

2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu dan Peserta Rapat	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	100 Orang	Rp	50.000.000	DAU		100 Orang	Rp	50.000.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	50 Kali	Rp	40.000.000	DAU		50 Kali	Rp	40.000.000
					Belanja operasi	: Rp	140.000.000		Belanja operasi	Rp	140.000.000
					Belanja pegawai	: Rp	-		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	140.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	140.000.000
					Belanja bunga	: Rp	-		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp	-		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp	-		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp	-		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp	-		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp	-		Belanja transfer		

2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebelair	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	1 Paket	Rp	-	DAU	1 Paket	Rp	-
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	1 Paket	Rp	-	DAU	1 Paket	Rp	-
					Belanja operasi	: Rp	-	Belanja operasi	Rp	-
					Belanja pegawai	: Rp	-	Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-	Belanja barang dan jasa	Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-	Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp	-	Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp	-	Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-	Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp	-	Belanja modal	Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-	Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp	-	Belanja transfer		
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Operasional	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp	750.000.000	DAU	12 Bulan	Rp	750.000.000
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di kirim	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	900 Surat	Rp	30.000.000	DAU	900 Surat	Rp	30.000.000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan untuk Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telpon	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	12 Bulan	Rp	600.000.000	DAU	12 Bulan	Rp	600.000.000
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	1 Paket	Rp	45.000.000	DAU	1 Paket	Rp	45.000.000

2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU		1 Paket	Rp	75.000.000
						Belanja operasi : Rp			Belanja operasi	Rp	750.000.000
						Belanja pegawai : Rp			Belanja pegawai		
						Belanja barang dan jasa : Rp	750.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	750.000.000
						Belanja bunga : Rp	-		Belanja bunga		
						Belanja subsidi : Rp	-		Belanja subsidi		
						Belanja hibah : Rp	-		Belanja hibah		
						Belanja bantuan sosial : Rp	-		Belanja bantuan sosial		
						Belanja modal : Rp	-		Belanja modal		
						Belanja tidak terduga : Rp	-		Belanja tidak terduga		
						Belanja transfer : Rp	-		Belanja transfer		
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	14 Kendaraan	Rp	356.600.000	DAU		14 Kendaraan	Rp	356.600.000
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	14 Kendaraan	Rp	300.000.000	DAU		14 Kendaraan	Rp	300.000.000
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	14 Kendaraan	Rp	26.600.000	DAU		14 Kendaraan	Rp	26.600.000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di perbaiki	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	2 Gedung	Rp	30.000.000	DAU		2 Gedung	Rp	30.000.000

2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasaran Gedung Kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan	3 Paket	Rp	-	DAU	3 Paket	Rp	-
					Belanja operasi	: Rp	326.600.000	Belanja operasi	Rp	356.600.000
					Belanja pegawai	: Rp	-	Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	326.600.000	Belanja barang dan jasa	Rp	356.600.000
					Belanja bunga	: Rp	-	Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp	-	Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp	-	Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-	Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp	30.000.000	Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp	-	Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp	-	Belanja transfer		

02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Kabupaten Pasuruan	0,6	Rp	1.700.000.000	DAU	0,6	Rp	1.700.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	Kabupaten Pasuruan	160 Peserta	Rp	1.600.000.000	DAU	160 Peserta	Rp	1.600.000.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	Kabupaten Pasuruan	160 Peserta	Rp	1.600.000.000	DAU dan DBHCHT/C UKAI	160 Peserta	Rp	1.600.000.000	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Koordinasi	Kabupaten Pasuruan	12 Kali	Rp	-	DAU	12 Kali	Rp	-	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan	Kabupaten Pasuruan	1 Paket	Rp	-	DAU	1 Paket	Rp	-	
						Belanja operasi : Rp	1.600.000.000		Belanja operasi	Rp	1.600.000.000
						Belanja pegawai : Rp	-		Belanja pegawai		
						Belanja barang dan jasa : Rp	1.600.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	1.600.000.000
						Belanja bunga : Rp	-		Belanja bunga		
						Belanja subsidi : Rp	-		Belanja subsidi		
						Belanja hibah : Rp	-		Belanja hibah		
						Belanja bantuan sosial : Rp	-		Belanja bantuan sosial		
						Belanja modal : Rp	-		Belanja modal		
						Belanja tidak terduga : Rp	-		Belanja tidak terduga		
						Belanja transfer : Rp	-		Belanja transfer		

2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga LPK	Kabupaten Pasuruan	16 LPK	Rp	25.000.000	DAU		16 LPK	Rp	25.000.000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga LPK	Kabupaten Pasuruan	16 LPK	Rp	25.000.000	DAU		16 LPK	Rp	25.000.000
					Belanja operasi	: Rp	25.000.000		Belanja operasi	Rp	25.000.000
					Belanja pegawai	: Rp	-		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	25.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	25.000.000
					Belanja bunga	: Rp	-		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp	-		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp	-		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp	-		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp	-		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp	-		Belanja transfer		

2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah SDM	Kabupaten Pasuruan	2 Orang	Rp	25.000.000	DAU	2 Orang	Rp	25.000.000
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah SDM	Kabupaten Pasuruan	2 Orang	Rp	25.000.000	DAU	2 Orang	Rp	25.000.000
					Belanja operasi	: Rp 25.000.000		Belanja operasi	Rp	25.000.000
					Belanja pegawai	: Rp -		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp 25.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	25.000.000
					Belanja bunga	: Rp -		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp -		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp -		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp -		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp -		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp -		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp -		Belanja transfer		

2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi	Kabupaten Pasuruan	10 Perusahaan	Rp	25.000.000	DAU		10 Perusahaan	Rp	25.000.000
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi	Kabupaten Pasuruan	10 Perusahaan	Rp	25.000.000	DAU		10 Perusahaan	Rp	25.000.000
					Belanja operasi	: Rp 25.000.000			Belanja operasi	Rp	25.000.000
					Belanja pegawai	: Rp -			Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp 25.000.000			Belanja barang dan jasa	Rp	25.000.000
					Belanja bunga	: Rp -			Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp -			Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp -			Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp -			Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp -			Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp -			Belanja transfer		

2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan	Kabupaten Pasuruan	Peserta	Rp	25.000.000	DAU		Peserta	Rp	25.000.000
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan	Kabupaten Pasuruan	Peserta	Rp	25.000.000	DAU		Peserta	Rp	25.000.000
					Belanja operasi	: Rp 25.000.000			Belanja operasi	Rp	25.000.000
					Belanja pegawai	: Rp -			Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp 25.000.000			Belanja barang dan jasa	Rp	25.000.000
					Belanja bunga	: Rp -			Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp -			Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp -			Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp -			Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp -			Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp -			Belanja transfer		
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	Kabupaten Pasuruan	40%	Rp	200.000.000	DAU		40%	Rp	200.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBKK, Peserta Pelatihan	Kabupaten Pasuruan	60 BKK, 160 Peserta	Rp	100.000.000	DAU		60 BKK, 160 Peserta	Rp	100.000.000
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FKBKK, Peserta Pelatihan	Kabupaten Pasuruan	60 BKK, 160 Peserta	Rp	25.000.000	DAU		60 BKK, 160 Peserta	Rp	25.000.000

2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah SMA/SMK dan PT	Kabupaten Pasuruan	40	Rp	-	DAU	40	Rp	-	
					Belanja operasi	: Rp	25.000.000		Belanja operasi	Rp	25.000.000
					Belanja pegawai	: Rp	-		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	25.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	25.000.000
					Belanja bunga	: Rp	-		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp	-		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp	-		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp	-		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp	-		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp	-		Belanja transfer		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi	Kabupaten Pasuruan	1	Rp	60.000.000	DAU	1	Rp	60.000.000	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi	Kabupaten Pasuruan	1	Rp	10.000.000	DAU	1	Rp	10.000.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Sarana Prasarana	Kabupaten Pasuruan	1 Paket	Rp	25.000.000	DAU	1 Paket	Rp	25.000.000	

2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Kabupaten Pasuruan	250 Orang	Rp	25.000.000	DAU	250 Orang	Rp	25.000.000
					Belanja operasi	: Rp 60.000.000		Belanja operasi	Rp	60.000.000
					Belanja pegawai	: Rp -		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp 60.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	60.000.000
					Belanja bunga	: Rp -		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp -		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp -		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp -		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp -		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp -		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp -		Belanja transfer		
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang di layani	Kabupaten Pasuruan	100 Orang	Rp	25.000.000	DAU	100 Orang	Rp	25.000.000
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI yang di layani	Kabupaten Pasuruan	100 Orang	Rp	25.000.000	DAU	100 Orang	Rp	25.000.000
					Belanja operasi	: Rp 25.000.000		Belanja operasi	Rp	25.000.000
					Belanja pegawai	: Rp -		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp 25.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	25.000.000
					Belanja bunga	: Rp -		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp -		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp -		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp -		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp -		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp -		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp -		Belanja transfer		

2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi	Kabupaten Pasuruan	100 perusahaan	Rp	15.000.000	DAU	100 perusahaan	Rp	15.000.000
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang di monitor	Kabupaten Pasuruan	100 perusahaan	Rp	15.000.000	DAU	100 perusahaan	Rp	15.000.000
					Belanja operasi	: Rp 15.000.000		Belanja operasi	Rp	15.000.000
					Belanja pegawai	: Rp -		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp 15.000.000		Belanja barang dan jasa	Rp	15.000.000
					Belanja bunga	: Rp -		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp -		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp -		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp -		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp -		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp -		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp -		Belanja transfer		
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Kabupaten Pasuruan	50%	Rp	471.264.500	DAU	50%	Rp	471.264.500
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan perusahaan yang disyahkan	Kabupaten Pasuruan	50	Rp	105.770.000	DAU	50	Rp	105.770.000
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan perusahaan yang disyahkan	Kabupaten Pasuruan	50	Rp	12.000.000	DAU	50	Rp	12.000.000
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disyahkan	Kabupaten Pasuruan	25	Rp	-	DAU	25	Rp	-

2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dan Juma Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	1200 Perusahaan dan 6 Kali	Rp	93.770.000	DAU	1200 Perusahaan dan 6 Kali	Rp	93.770.000
					Belanja operasi	: Rp 105.770.000		Belanja operasi	Rp	105.770.000
					Belanja pegawai	: Rp -		Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp 105.770.000		Belanja barang dan jasa	Rp	105.770.000
					Belanja bunga	: Rp -		Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp -		Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp -		Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp -		Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp -		Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp -		Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp -		Belanja transfer		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan	Kabupaten Pasuruan	60 Kasus	Rp	365.494.500	DAU	60 Kasus	Rp	365.494.500
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mogok Kerja yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Fasilitasi	Kabupaten Pasuruan	10 Kasus	Rp	26.954.500	DAU	10 Kasus	Rp	26.954.500
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Sosialisasi	Kabupaten Pasuruan	60 Kasus	Rp	-	DAU	60 Kasus	Rp	-

2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah LKS Bipartit dan PUK SP/SB yang terbentuk	Kabupaten Pasuruan	10 LKS dan 12 PUK	Rp -	DAU	10 LKS dan 12 PUK	Rp -
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Revisi Perda, Rekomendasi LKS Tripartit dan Jumlah Peserta MAYDAY	Kabupaten Pasuruan	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	Rp 338.540.000	DAU	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	Rp 338.540.000
					Belanja operasi : Rp 365.494.500		Belanja operasi	Rp 365.494.500
					Belanja pegawai : Rp -		Belanja pegawai	
					Belanja barang dan jasa : Rp 365.494.500		Belanja barang dan jasa	Rp 365.494.500
					Belanja bunga : Rp -		Belanja bunga	
					Belanja subsidi : Rp -		Belanja subsidi	
					Belanja hibah : Rp -		Belanja hibah	
					Belanja bantuan sosial : Rp -		Belanja bantuan sosial	
					Belanja modal : Rp -		Belanja modal	
					Belanja tidak terduga : Rp -		Belanja tidak terduga	
					Belanja transfer : Rp -		Belanja transfer	
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi	Kabupaten Pasuruan	0,5	Rp 15.129.021	DAU	0,5	Rp 15.129.021
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigrasi	Kabupaten Pasuruan	5 KK	Rp 15.129.021	DAU	5 KK	Rp 15.129.021
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigrasi	Kabupaten Pasuruan	5 KK	Rp 15.129.021	DAU	5 KK	Rp 15.129.021

3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Peserta Penyuluhan	Kabupaten Pasuruan	100 Orang	Rp	-	DAU	100 Orang	Rp	-
					Belanja operasi	: Rp	15.129.021	Belanja operasi	Rp	15.129.021
					Belanja pegawai	: Rp	-	Belanja pegawai		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	15.129.021	Belanja barang dan jasa	Rp	15.129.021
					Belanja bunga	: Rp	-	Belanja bunga		
					Belanja subsidi	: Rp	-	Belanja subsidi		
					Belanja hibah	: Rp	-	Belanja hibah		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-	Belanja bantuan sosial		
					Belanja modal	: Rp	-	Belanja modal		
					Belanja tidak terduga	: Rp	-	Belanja tidak terduga		
					Belanja transfer	: Rp	-	Belanja transfer		

					Total Belanja operasi	: Rp 9.952.054.521			Total Belanja operasi	Rp 9.982.054.521
					Belanja pegawai	: Rp -			Belanja pegawai	
					Belanja barang dan jasa	: Rp 9.952.054.521			Belanja barang dan jasa	Rp 9.982.054.521
					Belanja bunga	: Rp -			Belanja bunga	Rp -
					Belanja subsidi	: Rp -			Belanja subsidi	Rp -
					Belanja hibah	: Rp -			Belanja hibah	Rp -
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			Belanja bantuan sosial	Rp -
					Total Belanja modal	: Rp 30.000.000			Total Belanja modal	Rp -
					Total Belanja tidak terduga	: Rp -			Total Belanja tidak terduga	Rp -
					Total Belanja transfer	: Rp -			Total Belanja transfer	Rp -
					Total Belanja PD	: Rp 9.982.054.521			Total Belanja PD	Rp 9.982.054.521

Pasuruan, 2021
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN

ttd.

Drs. TRI AGUS BUDIHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198602 1 002



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang penting di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dilingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang tercatat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan didanai oleh APBD Kabupaten dalam rangka mendukung Ketenagakerjaan dengan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja b) Pencari Kerja Yang Ditempatkan c) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun d) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan demikian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 ini dapat terwujud dan dilaksanakan untuk mencapai hasil akhir yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun Dengan harapan untuk Anggaran 2022 Dana yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan untuk mengakomodir hasil Musrebang dari masyarakat dapat diwujudkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan.

Pasuruan, 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASURUAN**

ttd.

Drs. TRI AGUS BUDIHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198602 1 002